

**PERAN KOMITE MADRASAH DALAM PELAKSANAAN
MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH (MBM)
DI MAN 1 PRINGSEWU**

Tesis

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Pendidikan (M.Pd)
Dalam Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan

Disusun oleh :

**ACHMAD DIMAS CAHYADIN
NPM. 1986131039**

Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam



**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**PERAN KOMITE MADRASAH DALAM PELAKSANAAN
MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH (MBM)
DI MAN 1 PRINGSEWU**

Tesis

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Pendidikan (M.Pd)
Dalam Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Disusun oleh :

**ACHMAD DIMAS CAHYADIN
NPM. 1986131039**

Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam

Pembimbing I : Dr. Ahmad Fauzan, M.Pd

Pembimbing II : Dr. Riyuzen Praja Tuala, M.Pd

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi tentang peran komite madrasah dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah di MAN 1 Pringsewu. Peran komite madrasah dalam kaitannya dengan peningkatan mutu layanan pendidikan adalah sebagai badan “advisory agency (pemberi pertimbangan), supporting agency (pendukung kegiatan layanan pendidikan), controlling agency (pengontrol kegiatan layanan pendidikan), mediator (penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Tujuan dalam penelitian ini yaitu : Untuk mengetahui bagaimanakah peran komite madrasah sebagai lembaga Pemberi pertimbangan (*advisory agency*), lembaga Pendukung (*supporting agency*), lembaga Pengontrol (*controlling agency*) dan sebagai Mediator dalam pelaksanaan MBS di MAN 1 Pringsewu.

Secara spesifik rumusan masalah yang akan dikaji penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Bagaimana peran komite madrasah sebagai lembaga Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam pelaksanaan MBM di MAN 1 Pringsewu?(2) Bagaimanakah peran komite madrasah sebagai lembaga Pendukung (*supporting agency*) dalam pelaksanaan MBM di MAN 1 Pringsewu?(3) Bagaimanakah peran komite madrasah sebagai lembaga Pengontrol (*controlling agency*) dalam pelaksanaan MBM di MAN 1 Pringsewu? (4) Bagaimanakah peran komite madrasah sebagai lembaga Mediator dalam pelaksanaan MBS di MAN 1 Pringsewu?

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Peran Komite Madrasah diMAN 1 Pringsewu sebagai pemberi pertimbangan yaitu memberikan pertimbangan dalam setiap perencanaan dan program yang disusun oleh madrasah, Komite madrasah sebagai pendukung yaitu menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan di MAN 1 Pringsewu berupa dukungan finansial, tenaga, dan dukungan pikiran. Komite madrasah sebagai (*controlling agency*) melakukan Kontrol terhadap pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di madrasah, Komite madrasah sebagai Mediator yaitu penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dengan madrasah. Penelitian ini merekomendasikan agar komite madrasah dapat menjadi penghubung antara madrasah dengan masyarakat secara efektif dan efisien dalam menjalankan dan mewujudkan cita-cita madrasah.

Kata Kunci : Peran Komite Madrasah dan Manajemen Berbasis Madrasah

PERNYATAAN ORISINALITAS/KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Achmad Dimas Cahyadin
NPM : 1986131039
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “**PERAN KOMITE MADRASAH DALAM PELAKSANAAN MANAJEMEN BERBASIS MADRASAH (MBM) DI MAN 1 PRINGSEWU**”. Adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, Desember 2023

Yang menyatakan,



Achmad Dimas Cahyadin
NPM. 1986131039



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan. Z. Abidin Pagar Alam Kedaton Bandar Lampung Telp (0721) 5617070

PERSETUJUAN

Judul : Peran Komite Madrasah Dalam Pelaksanaan Manajemen
Berbasis Madrasah (MBM) Di MAN 1 Pringsewu

Nama : Achmad Dimas Cahyadin

NPM : 1986131039

Jurusan : Manajemen Pendidikan Islam (MPI)

Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan Pasca Sarjana

MENYETUJUI

Telah disetujui untuk diajukan dan dipertahankan
dalam ujian terbuka pada Program Pascasarjana (PPs)
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Rivuzen Praja Tuala, M.Pd
NIP. 199608171995121002

Pembimbing II

Dr. Ahmad Fauzan, M.Pd
NIP. 197208182006041006

Mengetahui

Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

Dr. Sovia Mas Ayu, M.A
NIP. 197611302005012006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

Jalan. Z.Abidin Pagar Alam Kedaton Bandar Lampung
Telp.(0721) 5617070

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul “Peran Komite Madrasah Dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah Di MAN 1 Pringsewu”, ditulis oleh: Achmad Dimas Cahyadin, NPM: 1986131039 telah diujikan dalam Ujian Terbuka Tesis pada tanggal 26 Desember 2022 pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

Tim Penguji

Ketua : Dr. Hj. Heni Noviarita, SE., M.Si

Sekretaris : Dr. Sovia Mas Ayu, MA

Penguji I : Dr. Oki Dermawan, M.Pd

Penguji II : Dr. Riyuzen Praja Tuala, M.Pd

Penguji III : Dr. Ahmad Fauzan, M.Pd.

Direktur Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung

Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si
NIP. 198008012003121001

MOTTO

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْن يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴿١١﴾

Artinya : *Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Ar-Ra'd ayat 11).*¹

¹ Imam Ghazali Dkk, *Al Mumayyaz Alquran tajwid warna transliterasi Per kata*, (Bekasi : Cipta bagus segara), h. 250.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmatnya, sehingga selesainya Tesis ini. Sebagai tanda bakti, hormat dan kasih sayang kupersembahkan karya ini kepada :

1. Ibuku tercinta Ibu Sri Rahayu yang telah membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan kesabaran yang luar biasa dalam mendidik, membimbing, membiayai pendidikan, memberi semangat dan senantiasa berdoa demi keberhasilanku.
2. Istriku Fuji Lestari serta kakaku Frenti Pavitari, Rini Okta Ferliani, Fajar May Hendra dan adikku satria bakti darojaton yang selalu memberikan dukungan hingga menghantarkanku menyelesaikan pendidikan diPasca Sarjana UIN Raden Intan Lampung.
3. Almamater tercinta program pasca UIN Raden Intan Lampung.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam, penulis sampaikan terimakasih atas rahmatnya, nikmat iman dan nikmat islam sehingga masih diberi kesehatan. Shalawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita nabiyina wa maulana Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zaman yang terang ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.

Dalam penulisan tesis ini penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis berupa moral, material, spritual, langsung maupun tidak langsung, maka pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si selaku direktur Pasca UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Sovia Mas Ayu, MA sebagai ketua jurusan S2 MPI dan Dr. Junaida, MA selaku skretaris jurusan S2 MPI, yang telah membantu dalam proses perkuliahan serta memberikan dorongan dan motivasi.
3. Dr. Ahmad Fauzan, M.Pd selaku pembimbing I (satu) yang telah memberikan arahan dan dan bimbingan kepada penulis sehingga terwujudnya tesis ini dengan baik.
4. Dr. Riyuzen Praja Tuala, M.Pd selaku pembimbing II (dua) yang telah banyak mengarahkan dan membimbing penulis dengan sabar dan tulus sehingga terwujudnya karya tulis yang baik.
5. Seluruh dosen, pegawai dan staf yang ada dilingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepada perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan perpustakaan fakultas tarbiyah yang telah memberikan fasilitas sumber rujukan penulisa skripsi ini.

7. Kepala madrasah, bapak dan ibu guru diMAN 1 Pringsewu yang telah memberikan bantuan – bantuan selama melakukan penelitian.
8. Kawan-kawan seperjuangan Jurusan MPI 2019 dan MPI B 2019, Terimakasih atas dukungan dan bantuan kalian semua.
9. Almamater tercinta Pasca UIN Raden Intan Lampung terkhusus fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang telah memberikan banyak pengalaman.

Penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan, hal ini dikarenakan masih kurang dan terbatasnya ilmu dan teori yang dikuasai oleh penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun untuk tesis ini.

Bandar Lampung, 19 Januari 2023

Penulis

Achmad Dimas Cahyadin

NPM. 1986131039

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
MOTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus penelitian	20
C. Sub focus penelitian	21
D. Rumusan masalah	21
E. Tujuan penelitian.....	22
F. Manfaat penelitian	22
BAB II PEMBAHASAAN	25
A. Komite Madrasah	25
1. Pengertian Komite Madrasah	25
2. Peran Komite Madrasah	27
3. Fungsi Komite Madrasah	36
4. Tujuan Komite Madrasah	37
B. Manajemen Berbasis Madrasah	40
1. Pengertian Manajemen Berbasis Madrasah	40
2. Tujuan Manajemen Berbasis Madrasah	42
3. Manfaat Manajemen Berbasis Madrasah	43
4. Prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Madrasah	44
5. Komponen Manajemen Berbasis Madrasah	47
C. Karakteristik Manajemen Berbasis Madrasah	57
D. Penelitian yang Relevan	58

BAB III METODE PENELITIAN	60
A. Jenis Penelitian	60
B. Sumbe Data	60
C. Teknik Pengumpulan Data	62
D. Uji keabsahan Data	65
E. Teknik Analisa Data	67
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	70
1. Sejarah MAN 1 Pringsewu	70
2. Visi dan Misi MAN 1 Pringsewu	72
3. Profil MAN 1 Pringsewu	73
4. Data Keadaan MAN 1 Pringsewu	74
B. Temuan Penelitian	83
C. Pembahasan Temuan Penelitian	85
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	105
B. Rekomendasi	106
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian dalam beberapa tahun disempurnakan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah era pemerintah yang sentralis telah berakhir. Sistem pemerintahan telah berubah menjadi era pemerintah yang menganut asas desentralisasi atau otonomi. Hampir semua urusan pemerintah telah diotonomikan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten/kota.¹

Hal ini diwujudkan dalam bentuk tugas dan kewajiban yang harus diemban oleh daerah untuk mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat, daerah, dan antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan upaya reformasi pendidikan nasional melalui otonomi daerah, hubungan madrasah dengan masyarakat secara *education* dan *cultural* khususnya orang tua murid dan masyarakat sekitar madrasah juga perlu direformasi sehingga tanggung jawab pendidikan bukan hanya pada madrasah. Salah satunya adalah dengan membentuk Komite Madrasah atau Majelis Madrasah untuk memberdayakan orang tua murid dalam pendidikan.

Hal ini tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Kepmendiknas) Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah, yang berbunyi sebagai berikut :

¹ Suparlan, *Manajemen Berbasis Madrasah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h.4.

- a. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui upaya peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokratisasi pendidikan, perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal.
- b. Bahwa dukungan dan peran serta masyarakat perlu didorong untuk bersinergi dalam suatu wadah Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah yang mandiri.
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b serta memfasilitasi terbentuknya Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah.²

Keberadaan komite madrasah ini telah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat perlu dibentuk dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota, dan komite madrasah di tingkat satuan pendidikan. Amanat rakyat ini sejalan dengan konsepsi desentralisasi pendidikan, baik di tingkat kabupaten/kota maupun di tingkat madrasah. Amanat rakyat dalam Undang-Undang tersebut telah ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002 tanggal 2 April tentang dewan pendidikan dan komite madrasah.³

Menurut Departemen Pendidikan Nasional (Dirjen Dikdasmen) tujuan dibentuknya Komite Madrasah sebagai suatu organisasi masyarakat madrasah adalah sebagai berikut :

² Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional., h.109.

³ Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).h.92

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakara masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokrasi dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di suatu pendidikan.⁴

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, maka komite madrasah mempunyai peran dan fungsi. Peran yang dijalankan Komite Madrasah yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002, adalah sebagai berikut :

- a. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
- b. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan dalam penyelenggaraan pendidikan
- c. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
- d. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif) dengan masyarakat.⁵

Keberadaan komite madrasah merupakan bagian dari pewujudan manajemen berbasis madrasah yang melibatkan berbagai komponen, termasuk masyarakat dan wali murid. Peran komite madrasah dalam

⁴ Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional., h.109.

⁵ *Ibid*, h. 110

kaitannya dengan peningkatan mutu layanan pendidikan adalah sebagai badan “advisory agency (pemberi pertimbangan), supporting agency (pendukung kegiatan layanan pendidikan), controlling agency (pengontrol kegiatan layanan pendidikan), mediator (penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah). Berikut penulis paparkan data RAPBS di MAN 1 Pringsewu sesuai dengan peranan-peranan komite :

Tabel 1.1

Indikator Peran Komite Madrasah di MAN 1 Pringsewu

Peran Komite Madrasah	Fungsi Manajamen Pendidikan	Indikator Kinerja
1. Badan Pertimbangan (<i>Advisory agency</i>)	1. Perencanaan Madrasah	a. Memberikan masukan untuk menyusun RAPBM b. Menyelenggarakan Rapat
	2. Pengelolaan Sumber Daya pendidikan	a. Memberikan pertimbangan tentang tenaga pendidikan yang dapat diperbantukan dimadrasah b. Memberikan pertimbangan tentang sarana

		<p>prasarana yang dapat diperbantuan dimadrasah</p> <p>c. Memberikan pertimbangan tentang anggaran yang dapat dimanfaatkan dimadrasah</p>
2. Badan Pendukung (<i>Supporting agency</i>)	1. Pengelolaan Sumber Daya	<p>a. Memantau kondisi ketenagaan pendidikan di madrasah</p> <p>b. Mobilisasi tenaga kependidikan non guru untuk mengisi kekurangan dimadrasah</p>
	2. Pengelolaan Anggaran	<p>a. Memantau kondisi sarana dan prasarana yang ada dimadrasah</p> <p>b. Mengkoordinasikan dukungan terhadap anggaran pendidikan di madrasah</p> <p>c. Membolisasi</p>

		dukungan terhadap anggaran pendidikan dimadrasah
3. Badaan Penghubung (<i>mediator agency</i>)	3. Pengelolaan Sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Memantau kondisi sarana dan prasarana yang ada dimadrasah b. Memobilisasikan bantuan sarana dan prasarana dimadrasah
	1. perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menjadi penghubung antara komite madrasah dengan masyarakat, komite madrasah dengan madrasah dan komite madrasah dengan dewan pendidikan b. Mengidentifikasi aspirasi masyarakat untuk perencanaan pendidikan
	2. Pelaksanaan program	<ul style="list-style-type: none"> a. Mensosialisasikan kebijakan dan

		<p>program madrasah pada masyarakat</p> <p>b. Mengkomunikasikan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap madrasah</p>
	3. Pengelolaan Sumber Daya Pendidikan	<p>a. Mengidentifikasi kondisi sumber daya dimadrasah</p> <p>b. Memobilisasi bantuan masyarakat untuk pendidikan di madrasah</p> <p>c. Mengkoordinasikan bantuan masyarakat</p>
4. Badan Pengontrol (<i>Controlling agency</i>)	1. Memantau output pendidikan	<p>a. Memantau hasil ujian akhir</p> <p>b. Memantau angka partisipasi madrasah</p>
	2. Memantau pelaksanaan program madrasah	<p>a. Memantau penjadwalan program madrasah</p> <p>b. Memantau alokasi</p>

		anggaran untuk pelaksanaan program madrasah c. Memantau stakeholders pendidikan dalam pelaksanaan program madrasah
--	--	---

Berdasarkan tabel 1.1 indikator kinerja komite madrasah, peran komite madrasah ada empat yaitu komite madrasah sebagai badan pertimbangan, komite madrasah sebagai badan pendukung, komite madrasah sebagai badan pengontrol, dan komite madrasah sebagai badan penghubung atau mediator. Komite madrasah sebagai badan pertimbangan yaitu komite madrasah ikut terlibat dan memberikan masukan-masukan ketika pihak madrasah akan mengadakan suatu program-program di madrasah. Komite madrasah sebagai badan pendukung yaitu komite madrasah selalu mendukung program di madrasah yang kaitannya untuk memajukan mutu pendidikan di madrasah. Komite madrasah sebagai badan pengontrol yaitu komite madrasah senantiasa mengontrol keadaan madrasah. Komite madrasah sebagai badan penghubung yaitu ketika pihak madrasah akan mengadakan program-program di madrasah maka komite madrasah selalu terlibat dan menjadi badan penghubung atau mediator antara orang tua siswa, masyarakat, maupun pemerintah.

Salah satu tantangan dunia pendidikan saat ini adalah upaya peningkatan mutu itu tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja dengan kata lain peningkatan mutu madrasah itu tidak ditentukan oleh factor tunggal tetapi ditentukan oleh multi factor, salah satu factor yang menentukan peningkatan keberhasilan mutu madrasah adalah perhatian,

kepedulian dan kerjasama bersama antara madrasah dengan masyarakat, saat ini berdasarkan undang-undang No 20 tahun 2003 partisipasi masyarakat atau perhatian masyarakat yang diwujudkan dalam peran dan fungsinya didunia pendidikan telah dirumuskan didalam undang-undang No 20 tahun 2003 dalam membentuk komite madrasah/madrasah sebagaimana disebutkan didalam peran dan fungsi komite madrasah tersebut.

Sebagai institusi pendidikan peran komite sangat penting untuk terus memperbaiki dan menjaga kualitas dan proses pembelajaran dimadrasah. Dalam upaya memperbaiki dan menjaga kualitas dan proses pembelajaran madrasah dalam pengelolaan madrasah agar menjadi efektif dan efisien kepala madrasah harus menerapkan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM).⁶

Dalam manajemen yang diinginkan dalam dunia pendidikan bila dikaitkan dengan firman Allah SWT dalam surat As-Saf ayat 4, sebagai berikut :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ
مَّرْصُومٌ

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalan Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh*”.⁷

⁶ Barnawi dan Arifin, *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2017), h.11.

⁷ Imam Ghazali, *Al Mumayyaz Alquran tajwid warna transliterasi Per kata*, (Bekasi: Cipta bagus segara, n.d.), h.551.

Dari ayat diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa barisan yang teratur yang dimaksud dalam ayat tersebut diatas mengindikasikan sebuah organisasi yang memiliki manajemen yang baik atau teratur. Dan dapat diketahui bahwasannya Allah menyukai suatu organisasi yang memiliki manajemen baik dan dengan pengelolaan yang baik, diibaratkan sebuah bangunan yang kokoh.

Sebagai organisasi madrasah, madrasah berfungsi membina SDM yang kreatif dan inovatif bukan saja peserta didiknya, tetapi juga tenaga pendidiknya. Organisasi madrasah harus menjadi model organisasi yang tepat untuk semua tingkatan, dari tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Peningkatan mutu pendidikan yang telah diupayakan oleh pemerintah melalui Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah (MPMBM) harus dibarengi pula oleh peningkatan mutu dan menerapkan manajemen yang berorientasi pada mutu dan perbaikan yang berkesinambungan. Kegagalan dalam memperbaiki mutu pendidikan akibat manajemen yang lemah akan menimbulkan kegagalan generasi baik dalam makro maupun dimensi mikro. Oleh karena itu, manajemen madrasah harus mengembangkan kreatifitas, inovasi, modernisasi, dan terfokus pada pelanggan pendidikan.⁸

Dari berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah, telah memberikan harapan bagi kelangsungan dan terkendalinya kualitas pendidikan Indonesia semasa krisis. Akan tetapi, karena pengelolaannya yang terlalu kaku dan sentralistik, program itu pun tidak banyak memberikan dampak positif angka partisipasi pendidikan nasional maupun kualitas pendidikan tetap menurun, diduga hal tersebut berat kaitannya dengan masalah manajemen.

⁸ H.R.R Tilaar, *kekuasaan dan pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*, (Jakarta: Rineka cipta, n.d.), h.309.

Dalam kaitan ini, munculah salah satu pemikiran kearah pengelolaan pendidikan yang memberi keleluasaan kepada madrasah untuk mengatur dan melaksanakan berbagai kebijakan secara luas. Pemikiran ini dalam perjalanannya disebut Manajemen Berbasis Madrasah (MBM)), yang telah berhasil mengangkat komisi dan memecahkan berbagai masalah pendidikan beberapa negara maju, seperti Australia dan Amerika.⁹

Tujuan umum Manajemen Berbasis Madrasah bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan madrasah melalui pemberian kewenangan kepada madrasah, pemberian fleksibilitas yang lebih besar kepada madrasah untuk mengelola sumber daya madrasah dan mendorong partisipasi warga madrasah serta masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tujuan utama Manajemen Berbasis Madrasah adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi.¹⁰

BPPN dan Bank Dunia memberi pengertian bahwa MBM merupakan bentuk alternatif madrasah dalam program desentralisasi di bidang pendidikan, yang ditandai oleh otonomi luas di tingkat madrasah, partisipasi masyarakat dan dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Otonomi diberikan agar madrasah dapat leluasa mengelola sumber daya dengan mengalokasikannya sesuai prioritas kebutuhan serta tanggap terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Senada dengan itu, Depdikbud mengemukakan bahwa manajemen berbasis madrasah merupakan suatu penawaran bagi madrasah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan lebih memadai bagi para peserta didik.¹¹

⁹ Suparlan, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).h.53.

¹⁰ *Ibid.* h. 7.

¹¹ *Ibid* h. 11-12.

Pada tataran ini, Manajemen Berbasis Madrasah dapat diartikan sebagai pengelolaan yang memberikan otonomi atau kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar pada madrasah, memberikan fleksibilitas pada madrasah, mendorong partisipasi secara langsung dari warga madrasah yaitu guru, siswa, kepala madrasah, karyawan dan masyarakat dan meningkatkan mutu madrasah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, seluruh komponen madrasah bekerja sama dengan stakeholder madrasah bersama-sama untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah dengan standar dari pemerintah. Dengan penerapan MBM, masyarakat peduli pendidikan terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam pelaksanaan program pendidikan.¹²

Artinya, dalam hal ini, bukan hanya instansi bersifat komersial saja yang dituntut untuk berkompetensi, melainkan lembaga pendidikan juga dituntut untuk bersaing dengan lembaga pendidikan yang lain untuk menawarkan jasa yang ada kesesuaian dan keserasian dengan kebutuhan masyarakat sebagai *user education*. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan harus mempunyai sistem manajemen pendidikan yang baik dan mapan untuk menyongsong era kompetensi. Artinya, jika pendidikan ingin dilaksanakan secara terencana dan teratur, berbagai elemen yang terlibat dalam kegiatan perlu dikenali. Untuk itu, diperlukan pengkajian usaha pendidikan sebagai suatu sistem. Sistem di sini merupakan suatu mekanik dalam suatu anatomi pendidikan.

Terdapat beberapa konsep dalam mendefinisikan manajemen berbasis madrasah yaitu :

1. Manajemen berbasis madrasah adalah strategi untuk mewujudkan madrasah/madrasah yang efektif dan produktif.

¹² Suparlan, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014),h. 59.

2. Manajemen berbasis madrasah merupakan paradigma baru manajemen pendidikan, yang memberikan otonom luas pada madrasah atau madrasah, dan pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional.
3. Manajemen berbasis madrasah adalah ide tentang pengambilan keputusan pendidikan yang diletakan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran.¹³

Berdasarkan konsep tersebut maka mendefinisikan manajemen berbasis madrasah ini merupakan suatu pengelolaan madrasah yang dianggap ideal dan mampu meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Karan dengan konsep MBM ini madrasah diharapkan dapat mengelola institusinya secara otonom, transparan, partisipatif.

Menurut Jemenez dan Sawada menyimpulkan bahwa pelibatan masyarakat dan orang tua siswa (MBM) mempunyai dampak jangka panjang dalam meningkatkan hasil belajar. Dimmock dan Caldwell juga menemukan bahwa MBM memiliki lima keunggulan sebagai berikut :

1. MBM adalah lebih demokratis. MBM memungkinkan guru dan orang tua siswa dapat mengambil keputusan tentang pendidikan dengan cara-cara yang lebih demokratis daripada hanya sekedar memberikan kewenangan kepada orang-orang yang terbatas.
2. MBM adalah lebih relavan.
3. MBM adalah tidak birokratis.
4. MBM memungkinkan untuk lebih memiliki akuntabilitas.
5. MBM memungkinkan untuk dapat memobilisasi sumber daya secara lebih besar.¹⁴

¹³ Hasan Anshori, "Pentingnya Manajemen Berbasis Madrasah Dalam kepemimpinan madrasah efektif", *Tarbawi*, Vol. 2 No. 1 (2016), hal. 27,.

¹⁴ Suparlan, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).h. 57-58.

Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) pada hakikatnya adalah pemberian otonomi yang lebih luas pada madrasah dengan tujuan akhirnya meningkatkan mutu hasil penyelenggaraan pendidikan sehingga bisa menghasilkan prestasi yang sebenarnya melalui proses manajerial yang mapan. Melalui peningkatan kinerja dan partisipasi semua *stakeholder*-nya, madrasah pada semua jenjang dan semua jenis pendidikan dengan sifat otonomistiknya tersebut akan menjadi suatu instansi pendidikan yang organik, demokratis, kreatif, dan inovatif serta unik dengan ciri khasnya untuk melakukan pembaharuan sendiri (*self reform*). Artinya, dalam konteks ini, madrasah memiliki wewenang untuk mengambil keputusan sebab keputusan akan benar sesuai dengan kebutuhan dan realitas proses belajar mengajar dalam konsep Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) yang utuh.

Adapun komponen yang didesentralisasikan dan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah komponen-komponen manajemen berbasis madrasah, hal yang paling penting dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah adalah manajemen terhadap komponen-komponen madrasah itu sendiri. Sedikitnya terhadap tujuh komponen madrasah yang harus dikelola dengan baik dalam rangka MBM, yaitu :

1. Manajemen kurikulum
2. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan
3. Manajemen keuangan dan pembiayaan
4. Manajemen sarana dan prasarana
5. Manajemen kesiswaan
6. Manajemen peran serta masyarakat
7. Manajemen layanan khusus¹⁵

¹⁵ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004). h. 39.

Menurut Depdiknas, karakteristik yang harus dimiliki oleh madrasah sebagai indikator pelaksanaan MBS yang berhasil adalah sebagai berikut :

1. Input pendidikan
 - a) Memiliki kebijakan mutu
 - b) Sumber daya tersedia dan siap
 - c) Memiliki harapan dan prestasi yang tinggi

2. Proses
 - a) efektifitas proses belajar mengajar tinggi
 - b) kepemimpinan madrasah kuat
 - c) Pengelolaan yang efektif tenaga kependidikan
 - d) Madrasah memiliki budaya mutu
 - e) Madrasah memiliki *teamwork* yang kompak, cerdas dan dinamis
 - f) Madrasah memiliki kewenangan
 - g) Partisipasi warga madrasah dan masyarakat
 - h) Madrasah memiliki kewenangan
 - i) Madrasah memiliki kemauan untuk berubah
 - j) Madrasah melaksanakan evaluasi dan perbaikan dan berkelanjutan
 - k) Madrasah responsive dan antisipatif terhadap kebutuhan
 - l) Madrasah memiliki akuntabilitas
 - m) Madrasah memiliki sustainabilitas

3. *Output*

Output dapat diklarifikasikan menjadi dua, yaitu *output* berupa prestasi akademik dan *output* berupa prestasi non akademik.¹⁶

Alasan memilih MAN 1 Pringsewu sebagai tempat penelitian didasarkan beberapa hal, yaitu pertama, MAN 1 Pringsewu merupakan satu satunya madrasah aliyah di Pringsewu, ditandai dengan prestasi yang baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Kedua, ada banyak ekstrakurikuler dimadrasah tersebut, meliputi pramuka, tari, TPA, olahraga, music dan lain lain. Ketiga prestasi akademik berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa tingkat kelulusan mencapai 100%. Keempat, kondisi fisik bangunan dari tahun ke tahun dan berdasarkan observasi penelitian ke lokasi menunjukkan perkembangan yang cukup pesat.

MAN 1 Pringsewu merupakan madrasah menengah atas yang berada dikecamatan pajaresuk, kabupaten Pringsewu, yang pada awalnya adalah persiapan MAN Filial tanjung karang dipringsewu atau kelas jauh dari MAN 1 Tanjung Karang. Hasil pra penelitian awal di MAN 1 Pringsewu menunjukkan bahwa tingkat pelaksanaan MBM di MAN 1 Pringsewu sudah berjalan dengan baik dan cukup memuaskan walaupun ada sedikit perbaikan yang harus diadakan dalam pelaksanaan MBM nya.

Manajemen berbasis madrasah yang di terapkan di MAN 1 Pringsewu sudah mengikuti standar MBM pada secara umum yang mana kepala madrasah mendorong partisipasi warga madrasah serta masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan seperti halnya membimbing para guru untuk dapat meneliti dan memilih bahan-bahan mana yang baik dan sesuai dengan perkembangan anak dan tuntunan kehidupan masyarakat, kepala madrasah melakukan perawatan atau

¹⁶ Suparlan, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).h. 9.

pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dimadrasah, memberikan motivasi dan menghimpun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang berupa ide, gagasan, aspirasi, dana, tenaga, materi dan lain lain.

Oleh karena itu kualitas pelayanan dapat dikatakan sudah cukup memuaskan karena sudah dapat memenuhi harapan staff, masyarakat, dan siswanya. Tujuan pendidikan itu sendiri adalah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pelaksanaan MBM yang diberikan dengan seadanya, namun bagaimana bias tujuan pendidikan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Persaingan dalam dunia pendidikan yang semakin ketat dengan bermunculan madrasah madrasah yang berlomba-lomba menjadi yang terbaik. MAN 1 Pringsewu sudah dapat menyesuaikan dengan perkembangan dalam dunia pendidikan yang kebijakan-kebijakannya terus mengalami perubahan dan perbaikan.

Pegawai pada lingkup madrasah MAN 1 Pringsewu selalu di tuntut dan diberi arahan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan pekerjaan dan harus lebih professional dalam memberikan kepuasan kepada masyarakat. Pihak madrasah juga selalu melakukan strategi-strategi agar mendapatkan kepercayaan yang lebih lagi dari masyarakat serta dapat memberikan kualitas manajemen yang baik bagi siswanya.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di MAN 1 Pringsewu didapatkan data tentang pelaksanaan manajemen berbasis madrasah (MBM) dan peran komite madrasah sebagai berikut.

Tabel 1.2
Pelaksanaan Manajemen Bebas Madrasah (MBM) di MAN 1
Pringsewu

No	Indikator	Sub Indikator
1	Manajemen Kurikulum	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Penilaian
2	Manajemen Tenaga kependidikan dan pendidik	1. Menggerakkan 2. Mengarahkan 3. Membimbing 4. Membina 5. Memotivasi
3	Manajemen keuangan dan pembiayaan	Sumber Keuangan dan Pembiayaan 1. Bos 2. Komite
4	Manajemen sarana dan prasarana	1. Sarana (Gedung, ruang kelas kursi, media pengajaran dll) 2. Prasarana (Halaman, kebun, jalan menuju madrasah dll)
5	Manajemen peran serta masyarakat	Kegiatan atau program belajar mengajar yang berhubungan dengan masyarakat
6	Manajemen pelayanan khusus	1. Layanan Bimbingan 2. Layanan Kesehatan' 3. Layanan Kantin Madrasah

7	Manajemen kesiswaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Input 2. Output 3. Ruang Lingkup Kesiswaan (Kepramukaan, Osis dan Ekstrakurikuler)
----------	---------------------	---

Sumber : MAN 1 Pringsewu

Tabel 1.3

**Data Prestasi Akademik dan Non Akademik MAN 1 Pringsewu
Tahun 2019**

No	Jenis Kejuaraan/Lomba	Tahun	Tingkat	Ket
1	Lomba KSM Fisika	2019	Kabupaten	Juara 3
2	Robotik	2019	Sumbagsel	Juara 3
3	OSN Ekonomi	2019	Kabupaten	Juara 3
4	KSM Geografi	2019	Kabupaten	Juara 1, 2 dan 3
5	KSM Ekonomi	2019	Kabupaten	Juara 2 dan 3
6	KSM Biologi	2019	Kabupaten	Juara 1 dan 2
7	KSM Fisika	2019	Kabupaten	Juara 1
8	KSM Kimia	2019	Kabupaten	Juara 1
9	KSM Fisika	2019	Kabupaten	Juara 3
10	KSM Kimia	2019	Kabupaten	Juara 3
11	KSM Ekonomi	2019	Kabupaten	Juara 2 dan 3
12	KSM Geografi	2019	Kabupaten	Juara 1, 2 dan 3

Sumber : MAN 1 Pringsewu

Tabel 1.4
Data kegiatan RAPBM MAN 1 Pringsewu

No	Uraian Kegiatan/Penggunaan Anggaran Keuangan Komite MAN 1 Pringsewu tahun 2019
	Dana Komite Madrasah (SPP)
1	Kegiatan madrasah
2	Kepegawaian
3	Uang transport
4	Kesejahteraan/kesehatan
5	Biaya kantor
6	Pengadaan prasarana/sarana perbaikan dan pemeliharaan
7	Pengadaan pakaian seragam siswa dan guru
8	Kesejahteraan guru dan karyawan madrasah
9	Kegiatan organisasi/social agama
10	Kegiatan kesiswaan
11	Pelaksanaan ujian nasional dan madrasah
12	Tunjangan tanggung jawab

Sumber MAN 1 Pringsewu

Berdasarkan table-tabel diatas komite madrasah ikut terlibat dan memberikan masukan-masukan ketika pihak madrasah akan mengadakan suatu program-program atau kegiatan-kegiatan di madrasah. Dari hasil pra penelitian di MAN 1 Pringsewu penulis simpulkan bahwasannya manajemen berbasis madrasah di MAN 1 Pringsewu sudah baik yaitu sudah mengikuti langkah-langkah MBM pada umumnya, penerapan manajemen berbasis madrasah di MAN 1 Pringsewu yaitu meliputi :

1. Manajemen kurikulum

Kurikulum di MAN 1 Pringsewu menggunakan kurikulum 2013 dan dalam pengelolaannya sudah baik yang mana terdapat peyusunan, sosialisasi, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum.

2. Manajemen pendidik dan tenaga pendidik

Kepala madrasah di MAN 1 Pringsewu sangat memperhatikan tenaga pendidik sehingga selalu memberikan pelatihan-pelatihan kepada tenaga pendidik agar selalu bertanggung jawab atas pekerjaannya.

3. Manajemen kesiswaan

Manajemen kesiswaan di MAN 1 Pringsewu meliputi osis, kepramukaan dan ekstrakurikuler. Dan dalam penerimaan siswa-siwi baru terdapat dua tes yang harus dipenuhi, yaitu tes tertulis dan tes membaca alquran.

4. Manajemen keuangan dan pembiayaan

Sumber keuangan di MAN 1 Pringsewu terdapat dari 2 sumber yaitu Boss dan Komite. Dan pengelolaan komite dalam pembayaran dengan cara mengangsur menjadi 3x angsuran yaitu 50%, 35% dan 15%.

5. Manajemen sarana dan prasarana

Pengelolaan sarana dan prasarana di MAN 1 Pringsewu sudah baik karena selalu menjaga memelihara dan mengontrol sarana dan prasarana di madrasah. Dalam pengelolaannya terdapat tiga yang dikerjakan yaitu, skala prioritas, sekala bukan prioritas dan isidental.

6. Manajemen hubungan masyarakat dengan madrasah

MAN 1 Pringsewu memiliki kegiatan humas yang sangat unik, menarik dan baik yang mana kegiatan itu sangat membutuhkan masyarakat dan langsung terjun ke masyarakat,

yaitu kegiatan yang dilakukan humas MAN 1 Pringsewu adalah kegiatan PPM (Pengabdian pada masyarakat) yang dilaksanakan pada bulan ramadhan. Tugas siswa dalam kegiatan ini yaitu mengisi kultum di mushola/masjid, mengajar TPA, baksos dan lain-lain.

7. Manajemen layanan khusus

MAN 1 Pringsewu sangat memperhatikan layanan khusus yang diberikan sekoalah kepada siswa-siswinya, mulai dari toilet, perpustakaan, UKS, kantin dan layanan konseling.

Berdasarkan hasil data pra survey tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait peran komite madrasah dalam pelaksanaan manajemen berbasis madrasah (MBM) di MAN 1 Pringsewu.

B. Fokus Penelitian

Dari paparan latar belakang tersebut, maka fokus penelitian penulis dalam penelitian ini adalah “Peran komite madrasah dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) di MAN 1 Pringsewu”.

C. Sub Fokus Penelitian

Adapun sub fokus dalam penelitian ini yang berjudul peran komite madrasah dalam pelaksanaan manajemen berbasis madrasah (MBM) di MAN 1 Pringsewu adalah sebagai berikut yaitu :

1. Peran komite madrasah sebagai lembaga Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam pelaksanaan MBM di MAN 1 Pringsewu.
2. Peran komite madrasah sebagai lembaga Pendukung (*supporting agency*) dalam pelaksanaan MBM di MAN 1 Pringsewu.

3. Peran komite madrasah sebagai lembaga Pengontrol (*controlling agency*) dalam pelaksanaan MBM di MAN 1 Pringsewu.
4. Peran komite madrasah sebagai lembaga Mediator dalam pelaksanaan MBM di MAN 1 Pringsewu.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis sajikan dalam penelitian ini berdasarkan sub fokus penelitian yaitu :

1. Bagaimanakah peran komite madrasah sebagai lembaga Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam pelaksanaan MBM di MAN 1 Pringsewu?
2. Bagaimanakah peran komite madrasah sebagai lembaga Pendukung (*supporting agency*) dalam pelaksanaan MBM di MAN 1 Pringsewu?
3. Bagaimanakah peran komite madrasah sebagai lembaga Pengontrol (*controlling agency*) dalam pelaksanaan MBM di MAN 1 Pringsewu?
4. Bagaimanakah peran komite madrasah sebagai lembaga Mediator dalam pelaksanaan MBM di MAN 1 Pringsewu?

E. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian hendaknya memiliki tujuan dalam penelitian tersebut. Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah peran komite madrasah sebagai lembaga Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam pelaksanaan MBS di MAN 1 Pringsewu

2. Untuk mengetahui bagaimanakah peran komite madrasah sebagai lembaga Pendukung (*supporting agency*) dalam pelaksanaan MBS di MAN 1 Pringsewu
3. Untuk mengetahui bagaimanakah peran komite madrasah sebagai lembaga Pengontrol (*controlling agency*) dalam pelaksanaan MBS di MAN 1 Pringsewu
4. Untuk mengetahui bagaimanakah peran komite madrasah sebagai lembaga Mediator dalam pelaksanaan MBS di MAN 1 Pringsewu.

F. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi peneliti lain, penelitian ini digunakan untuk menambah pengetahuan dan untuk meneliti lebih lanjut dengan menggunakan variable lain.
 - b. Bagi penulis, untuk menambah pengetahuan-pengetahuan tentang Manajemen Berbasis Madrasah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini sebagai bahan untuk mengembangkan teori dalam khasanah ilmu pengetahuan.
 - b. Hasil penelitian ini dapat membantu para calon pendiri lembaga pendidikan agar dapat menerapkan Manajemen Berbasis Madrasah supaya lembaga pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan sehingga menarik pelanggan

BAB II PEMBAHASAN

A. Komite Madrasah

1. Pengertian Komite Madrasah

Menurut Undang-undang Sisdiknas No 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 25 “Komite madrasah/madrasah adalah lembaga mandiri, yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.”¹ Dalam pengertian lain disebutkan “Komite madrasah adalah institusi yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan madrasah, maupun lembaga pemerintah lainnya. Walaupun komite madrasah dan madrasah memiliki kemandirian masing-masing, namun tetap sebagai mitra yang harus saling bekerja sama.”²

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa Komite madrasah adalah badan mandiri yang beranggotakan wali murid, komunitas madrasah dan tokoh masyarakat, yang hubungan keduanya tidak bersifat hirarkis, tetapi saling bekerja sama sebagai mitra dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dalam satuan pendidikan.

Komite madrasah dapat juga diartikan sebagai suatu badan atau lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para *stakeholder* pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.

¹ Direktorat Pendidikan Agama Islam, *Pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah*, (Jakarta: Dirjen PAIS KEMENAG RI, 2012), h.8.

² Fatah Syukur, *Manajemen Pendidikan Berbasis Pada Madrasah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011), h.89-90.

Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah merupakan tuntutan untuk lebih meningkatkan peran serta keluarga dan masyarakat. Tuntutan tersebut lahir seiring dengan terjadinya perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi.³

Komite madrasah terdiri atas orang tua/wali murid, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha/industri, organisasi profesi tenaga pendidikan/guru, dan wakil alumni. Anggota komite dapat melibatkan dewan guru dan yayasan atau lembaga penyelenggara pendidikan. Syarat-syarat, hak, dan kewajiban, serta masa keanggotaan komite madrasah ditetapkan dalam Anggaran Dasar (AD) atau Anggaran Rumah Tangga (ART). Sedangkan untuk nama badan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing satuan pendidikan, seperti komite madrasah, majelis madrasah, majelis madrasah, komite TK, atau nama-nama lain yang disepakati bersama.

Pembentukan komite madrasah secara yuridis didasarkan pada beberapa ketentuan Undang-undang, di antara adalah sebagai berikut

- a. Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Sisdiknas yang berbunyi: Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite madrasah/madrasah.”⁴
- b. Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Sisdiknas yang berbunyi: Komite madrasah/madrasah, sebagai lembaga mandiri,

³ Departemen Pendidikan Nasional Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, *Petunjuk Teknis Pemberdayaan Komite Sekolah Tahun 2007 – 2009*, (Jakarta, 2007), h.4.

⁴ Tim Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Cet. 4*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.36.

dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.”⁵

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pembentukan Komite Madrasah memiliki landasan hukum yang kuat dalam bentuk undang-undang. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mensinergikan tri pusat pendidikan yang terdiri dari keluarga, masyarakat dan madrasah, sehingga memiliki kesamaan visi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Orang tua sangat berkepentingan peningkatan mutu layanan pendidikan di madrasah, sedangkan madrasah tidak dapat menjalankan proses pendidikan secara optimal tanpa dukungan orang tua dan masyarakat, baik dukungan moral maupun material.

Terbentuknya komite madrasah tidak terlepas dari paradigma baru dunia pendidikan dewasa ini yang menekankan pola hubungan antara madrasah dan orang tua murid dalam kemitraan sejajar. Hubungan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa masing-masing pihak merasa berkepentingan terhadap peningkatan layanan pendidikan di madrasah.

2. Peran Komite Madrasah

Komite madrasah sebagai mitra madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan memiliki peran sebagai berikut :

a. *Advisory agency* (pemberi pertimbangan)

Komite madrasah sebagai badan pemberi pertimbangan terhadap madrasah memiliki arti, bahwa komite madrasah

⁵ *Ibid*, h. 37

dipandang mitra kerja kepala madrasah yang dapat diajak bermusyawarah tentang masa depan madrasah.⁶ Melalui komite madrasah, orang tua dan masyarakat dapat ikut serta, merumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh madrasah, sampai dengan menetapkan cara atau strategi yang akan ditempuh untuk mencapainya yang berupa rumusan kebijakan, program, dan kegiatan madrasah. Selama ini keberadaan komite madrasah sangat berarti sekali bagi setiap satuan pendidikan. Karena komite madrasah merupakan pembantu utama satuan dalam memakmurkan lembaga pendidikan selain masyarakat internal madrasah. Segala macam program yang akan dilaksanakan madrasah sebaiknya terlebih dahulu dikonsultasikan dengan komite madrasah. Sebab, segala macam kebijakan yang akan diterapkan ataupun yang akan dilaksanakan tidak terlepas dari partisipasi masyarakat internal maupun eksternal madrasah

Komite madrasah sebagai badan pemberi pertimbangan khususnya dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, misalnya dalam hal pengadaan peralatan laboratorium, pengrehapan ruang kelas, rencana pembangunan ruang kelas, sebelum madrasah mengambil keputusan maka terjadilah diskusi antara komite madrasah dan pihak madrasah.

Selain daripada itu, posisi komite madrasah sebagai pemberi pertimbangan masih berlanjut pada pemberian pada pemberian masukan dan pertimbangan dalam hal rancangan anggaran pendapatan dan belanja madrasah (RAPBS), kriteria kinerja satuan, kriteria tenaga kependidikan, dan kriteria

⁶ Kepmendiknas SK No. 004/U/2002, *Tentang Acuan Pembentukan Komite Sekolah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).h. 122

fasilitas pendidikan.⁷

b. *Supporting agency* (pendukung kegiatan layanan pendidikan)

Peran komite sebagai badan pendukung bagi penyelenggaraan dan upaya peningkatan mutu pendidikan, dapat berupa dukungan finansila, tenaga, dan dukungan pikiran. Secaranyata pemberian dukungan ini dapat diwujudkan diantaranya dengan pemecahan masalah kekurangan guru, biaya madrasah bagi anak kurang mampu, dan tenaga untuk ikut memperbaiki madrasah yang rusak. Peremberdayaan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan di madrasah melalui sumber daya yang ada pada masyarakat, hal ini dilakukan dengan berkoordinasik dengan dewan pendidik.⁸

Peran pendukung yang dipegang oleh komite madrasah hidak hanya sebatas memberikan dorongan dan motivasi saja, namun lebih dari itu. Dengan berperan sebagai supporting agency ini, Komite madrasah dapat mendorong dan menyadarkan para orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan.⁹ Karena pendidikan khususnya lembaga (satuan) pendidikan tidak dapat berperan sebagai mana fungsihnya sebagai lembaga pembentuk generasi beradab dan berpengetahuan tanpa medapat dukungan besar dari masyarakat luas.

⁷ Departemen Agama RI., *Pedoman Komite Sekolah (Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam)*., 2003.

⁸Keppmendiknas SK No. 004/U/2002, *Tentang Acuan Pembentukan Komite Sekolah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003) h. 122.

⁹Sri Rerani Pantjastuti, *Komite Sekolah*, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008).h.

Pada dasarnya pendidikan yang baik membutuhkan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, ruangan kelas yang cukup, serta biaya yang banyak. Akan tetapi selama ini anggaran yang terdapat di madrasah sangat terbatas, oleh karenanya dalam hal ini masyarakat diharapkan menjadi penanggung jawab dan donatur yang memberikan dana demi kelancaran kegiatan pendidikan di madrasah. Masyarakat yang berminat dan bersimpati dapat memberikan bantuannya melalui berbagai cara, misalnya: membantu penyediaan alat peraga, buku-buku, serta memberikan biaya kepada anak didik yang kurang mampu.¹⁰

Komite madrasah sangat membantu kemandirian madrasah dalam hal anggaran, fasilitas madrasah yang masih kurang, mencari dana untuk menambah insentif guru, dengan mengajukan bantuan dana tanpa memberatkan orang tua siswa. Selain fungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, dalam hal ini komite madrasah juga berperan dalam penggalangan dana dalam rangka pembiayaan pendidikan¹¹.

Selain membantu dalam sarana dan prasarana yang ada di madrasah komite madrasah juga membantu mengembangkan sumber daya manusianya, yakni dengan memberikan sumbangan saran dan motivasi agar para guru senen tiasa dapat meningkatkan kinerjanya sehingga madrasah bisa menjadi lebih maju dan mampu bersaing dengan madrasah-madrasah lain.

¹⁰ *Ibid*, h.85

¹¹ *Ibid*, h 86

c. *Controlling agency* (pengontrol kegiatan layanan pendidikan)

Peran komite madrasah selanjutnya adalah sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di madrasah. Pengawasan yang dilakukan oleh komite madrasah meliputi kontrol terhadap pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di madrasah, di samping alokasi dana dan sumber-sumber daya bagi pelaksana program di madrasah. Komite madrasah juga melakukan fungsi kontrolnya terhadap keberhasilan pendidikan di madrasah yang dilihat dari mutu output pendidikan. Hasil pengawasan terhadap madrasah akan dijadikan bahan pertimbangan yang cukup menentukan bagi penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan.¹²

Peran dalam controlling ini juga dimaksudkan agar komite madrasah sebagai partner madrasah dan masyarakat memberikan service yang memuaskan, terlebih yang berhubungan dengan input dan output yang dihasilkan madrasah harus dapat diterima oleh masyarakat sebagai pengguna.

d. Mediator (penghubung atau pengait tali komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah).

Sebagai penghubung atau mediator antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat memiliki arti, bahwa aspirasi orang tua dan masyarakat akan disalurkan melalui komite madrasah untuk disampaikan kepada madrasah. Peran sebagai mediator ini memerlukan kecermatan dalam

¹² Kepmendiknas SK No. 004/U/2002, *Tentang Acuan Pembentukan Komite Sekolah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 122.

mengidentifikasi kepentingan, kebutuhan dan keluhan orang tua dan masyarakat.¹³

Aspirasi yang disalurkan melalui komite madrasah dimanfaatkan oleh madrasah sebagai masukan bagi koreksi ke arah perbaikan. Komite madrasah juga berperan dalam mengsosialisaikan berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan madrasah sehingga dapat akuntabel (dipertanggung jawabkan) kepada masyarakat. Bagi komite madrasah peran yang halus dijalankan sebagai mediator adalah pemberdayaan sumber daya yang ada pada orangtua siswa bagi pelaksanaan pendidikan madrasah.¹⁴

Dalam oprasionalnya, komite madrasah sebagai mediator ini lebih banyak untuk ditujukan dalam menjalin kerjasama dengan masyarakat, menampung serta menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Kerjasama dengan masyarakat ini sangat mutlak untu dilakukan sebab madrasah adalah sebuah sistem yang berada di tngah-tengah masyarakat, hidup dan mati lembaga pendidikan tergantung dari peran serta masyarakat.

Sesuai dengan perannya sebagai mediator antara pemerintah dengan masyarakat, komite madrasah berusaha untuk memberikan pengarahan dan keterangan yang jelas mengenai kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan hal ini berujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat bahwa pamerintah selalu melakukan upaya perbaikan dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat

¹³ *Ibid*, h. 122

¹⁴ *Ibid*, h. 122

Memahami kutipan di atas dapat dipahami bahwa komite madrasah memiliki peran yang cukup penting dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan di madrasah. Peran tersebut meliputi memberi pertimbangan kepada pengelola satuan pendidikan dalam mengambil kebijakan, dan mengontrol kegiatan layanan pendidikan di satuan pendidikan. Hal ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan akuntabilitas pengelolaan pendidikan, terutama yang berkaitan dengan penggunaan dana pendidikan. Selain itu komite madrasah berperan sebagai mediator antara madrasah dengan masyarakat, terutama kepada wali murid.¹⁵

Komite madrasah memiliki peran dalam memberikan pertimbangan atau pilihan-pilihan kepada madrasah, serta memberikan dukungan, kontrol, dan menjembatani kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan. Peran komite madrasah memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, mendukung penyelenggaraan pendidikan, mengontrol dan mediator antara pemerintah dengan masyarakat. Selain itu juga berfungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pendidikan berkualitas, melakukan kerjasama dengan masyarakat, menampung dan menganalisa aspirasi, memberi masukan, mendorong orang tua murid dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan, menggalang dana dari masyarakat dan melakukan evaluasi.

Komite madrasah sebagai lembaga mandiri dan mitra dari madrasah dalam upaya menciptakan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu memiliki fungsi sebagai berikut :

¹⁵ Sri Rerani Pantjastuti, *Komite Sekolah*, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008).h.77.

- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- b. Melakukan upaya kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
- d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - 1) kebijakan dan program pendidikan,
 - 2) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Madrasah (RAPBM),
 - 3) kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan,
 - 4) kriteria fasilitas pendidikan; dan
 - 5) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
- e. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
- f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
- g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.¹⁶

¹⁶ Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).h. 93-94

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa komite madrasah berfungsi meyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, serta menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan serta pelayanan pendidikan yang berkualitas di satuan pendidikan. Posisi komite madrasah berada di tengah-tengah antara wali murid, murid, guru, masyarakat setempat, dan kalangan swasta di satu pihak dan madrasah sebagai institusi, kepala madrasah, dinas pendidikan, dan pemerintah daerah di pihak lainnya. Keberadaan komite madrasah menjembatani kepentingan keduanya.

Salah satu indikator kinerja komite madrasah yaitu memberikan masukan untuk penyusunan Rencana Anggaran dan Belanja Madrasah (RAPBM), memberikan pertimbangan perubahan dan ikut mengesahkan RAPBM bersama kepala madrasah. Memberdayakan dewan pendidikan dan komite madrasah merupakan salah satu alternatif dalam melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pendidikan di madrasah. Keterlibatan komite madrasah dapat diawali dari penyusunan RAPBM. Keterlibatan komite madrasah mulai dari proses awal ini memungkinkan komite madrasah melakukan kontrol. Hal ini penting untuk menghindari penyelewengan dan memenuhi aspek transparansi dalam pengelolaan pendidikan dan dana pendidikan.¹⁷

¹⁷ Sri Rerani Pantjastuti, *Komite Sekolah*, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008). h.113.

3. Fungsi Komite Madrasah

Lebih lanjut dalam Kepmendiknas nomor 044/u/2002 dijelaskan bahwa Komite Madrasah berfungsi :

- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- b. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/ organisasi/ dunia usaha/ dunia industri), dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- c. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai:
 - 1) kebijakan dan program pendidikan
 - 2) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Madrasah (RAPBM)
 - 3) kriteria kinerja satuan pendidikan
 - 4) kriteria tenaga kependidikan
 - 5) kriteria fasilitas pendidikan
 - 6) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
- e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
- f. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan¹⁸

¹⁸ Kepmendiknas SK No. 004/U/2002, *Tentang Acuan Pembentukan Komite Sekolah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).h.123

Dari penjelasan tersebut, dapat peneliti pahami bahwa fungsi dari komite madrasah adalah menumbuhkan perhatian dan komitmen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pendidikan dan menggalang dana untuk meningkatkan mutu pendidikan. Komite juga berfungsi memberikan masukan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

Komite Madrasah sesuai dengan peran dan fungsinya, melakukan akuntabilitas sebagai berikut.

- a. Komite Madrasah menyampaikan hasil kajian pelaksanaan program madrasah kepada satkeholder secara periodik, baik yang berupa keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program madrasah.
- b. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan masyarakat baik berupa materi (dana, barang tak bergerak maupun bergerak), maupun non materi (tenaga, pikiran) kepada masyarakat dan pemerintah setempat.

4. Tujuan Komite Madrasah

Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah yang terkandung dalam konsep komite madrasah merupakan salah satu cara dalam menarik orang-orang yang berkompeten dalam memajukan pendidikan di madrasah. Tujuan pembentukan komite madrasah pada dasarnya adalah menciptakan akuntabilitas, transparansi dan peningkatan mutu layanan pendidikan di madrasah. Lebih lanjut tujuan pembentukan komite madrasah dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di madrasah.
- b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.
- c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di madrasah.¹⁹

Tujuan dibentuknya komite madrasah dimaksudkan agar tercipta organisasi masyarakat madrasah yang mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas madrasah. Tujuan dibentuknya komite madrasah adalah untuk mewadahi partisipasi masyarakat agar turut serta dalam operasional manajemen madrasah sesuai dengan peran dan fungsinya, berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program madrasah secara proposional, sehingga komite madrasah dapat meningkatkan mutu pendidikan.

Melalui komite madrasah, masyarakat atau orang tua murid sebagai penyumbang dana pendidikan di satuan pendidikan berhak menuntut madrasah apabila pelayanan dari madrasah tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Disamping itu masyarakat melalui komite madrasah berhak mengetahui berbagai kucuran dana yang mengalir ke madrasah.²⁰

Pembentukan komite madrasah harus dilakukan secara demokratis, diumumkan secara terbuka, dan diketahui masyarakat luas. Transparansi dimulai dari tahap pembentukan panitia

¹⁹ E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian Guru Dan Kepala Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).h. 128

²⁰ Sri Rerani Pantjastuti, *Komite Sekolah*, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008). h.224.

persiapan, sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, pengumuannya dan penyampaian hasil pemilihan. Laporan pertanggung jawaban panitiapun harus jelas.²¹

Pembentukan komite madrasah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Dilakukan secara transparan adalah bahwa komite madrasah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia persiapan, proses sosialisasi oleh panitia persiapan, kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Dilakukan secara akuntabel adalah bahwa panitia persiapan hendaknya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerjanya maupun penggunaan dana kepanitiaan. Dilakukan secara demokratis adalah bahwa dalam proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah dan mufakat. Jika dipandang perlu, pemilihan anggota dan pengurus dilakukan melalui pemungutan suara.²²

Memahami kutipan di atas dapat dipahami bahwa prosedur pembentukan komite madrasah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pembentukan komite madrasah. Langkah ini bertujuan agar masyarakat dapat memberikan saran dan masukan tentang figur yang cocok untuk menjadi pengurus dan anggota komite madrasah.
- b. merumuskan kriteria pengurus dan anggota komite madrasah. Proses ini dimaksudkan agar dapat diperoleh

²¹ Sri Rerani Pantjastuti, *Komite Sekolah*, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008). h.229.

²²Hasbullah, *Otonomi Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) .h. 99

calon pengurus dan anggota komite madrasah yang berkualitas dan berdedikasi tinggi untuk peningkatan mutu pendidikan di madrasah.

- c. Menyeleksi calon pengurus dan anggota berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
- d. Mengumumkan nama-nama calon pengurus dan anggota kepada masyarakat melalui media yang relevan.
- e. Mengadakan rapat untuk memfasilitasi proses pemilihan pengurus dan anggota komite madrasah secara transparan dan demokratis
- f. Berdasarkan prosedur penetapan anggota komite madrasah di atas dapat dipahami bahwa prinsip utama pembentukan komite madrasah adalah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan demokratis.

B. Manajemen Berbasis Madrasah

1. Pengertian Manajemen Berbasis Madrasah

Secara bahasa, Manajemen Berbasis Madrasah berasal dari tiga kata, yaitu manajemen, berbasis, dan madrasah. Manajemen adalah proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.²³ Madrasah adalah lembaga untuk belajar mengajar serta tempat untuk menerima dan memberikan pelajaran. Berdasarkan makna leksikal tersebut, Manajemen berbasis madrasah (MBM) dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang berasaskan pada madrasah dalam proses pengajaran atau pembelajaran.

Eman Suparman, seperti yang dikutip oleh Mulyono, mendefinisikan Manajemen Berbasis Madrasah dengan penyerasian

²³ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).h.708.

sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh madrasah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan madrasah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu madrasah atau untuk mencapai tujuan mutu madrasah dalam pendidikan nasional²⁴.

Manajemen Berbasis Madrasah merupakan padanan kata dari *school-based Management*, dalam hal ini Bank dunia telah memberikan pengertian bahwa ”*School-based Management is decentralization of levels of authority to the school level. Responsibility and decision-making over school operations is transferred to principals, teacher, parents, sometimes students, and other school community member. The school- level actors, however, have to conform to, or operate, within a set of centrally determined policies*”, yang artinya manajemen berbasis madrasah adalah desentralisasi level otoritas penyelenggaraan madrasah kepada level madrasah. Tanggung jawab dan pengambilan keputusan terhadap pelaksana atau penyelenggara madrasah telah diserahkan kepada kepala madrasah, guru-guru, para orang tua siswa, kadang-kadang peserta didik atau siswa, dan anggota komunitas madrasah lainnya.²⁵

Menurut E. Mulyasa pengertian manajemen madrasah madrasah adalah pemberian otonomi luas pada tingkat madrasah agar madrasah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap dengan kebutuhan setempat.²⁶

²⁴ Mulyono, *Manajemen Administrasi Dan Organisasi Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2008).h. 239.

²⁵ Suparlan, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).h. 49.

²⁶ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).h. 19.

Manajemen Berbasis Madrasah memberikan kekuasaan penuh kepada madrasah secara individual, dalam proses pengambilan keputusan madrasah tidak boleh berada di satu tangan saja, ketika Manajemen Berbasis Madrasah belum ditetapkan, proses pengambilan keputusan madrasah seringkali dilakukan sendiri oleh pihak madrasah secara internal yang dipimpin langsung oleh kepala madrasah. Namun, dalam kerangka Manajemen Berbasis Madrasah proses pengambilan keputusan mengikutkan partisipasi dari berbagai pihak baik internal, eksternal, maupun jajaran birokrasi sebagai pendukung. Dalam pengambilan keputusan harus dilakukan secara kolektif diantara stakeholder madrasah.

2. Tujuan Manajemen Berbasis Madrasah

Menurut E. Mulyasa menyebutkan tujuan utama MBM adalah meningkatkan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Peningkatan mutu diperoleh melalui partisipasi orang tua, kelenturan pengelolaan madrasah, peningkatan profesionalisme guru, adanya hadiah dan hukuman sebagai kontrol, serta hal lain yang dapat menumbuhkembangkan suasana yang kondusif. Pemerataan pendidikan nampak pada tumbuhnya partisipasi masyarakat terutama yang mampu dan peduli, sementara yang kurang mampu akan menjadi tanggung jawab pemerintah.²⁷

Dari uraian diatas, terlihat bahwa Manajemen Berbasis Madrasah bertujuan untuk membuat madrasah dapat lebih mandiri dalam memberdayakan madrasah melalui pemberian kewenangan, fleksibilitas yang lebih besar terhadap madrasah dalam mengelola

²⁷ *Ibid.*, h. 25.

sumber daya dan mendorong partisipasi warga madrasah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan.

3. Manfaat Manajemen Berbasis Madrasah

Manfaat MBM secara maksimal terdapat implikasi yang harus dipenuhi melalui penerapan MBM di suatu madrasah. Implikasi tersebut berupa perubahan peran-peran dari para pihak para kepala madrasah, para guru dan siswa di madrasah maupun masyarakat dan orang tua siswa. Di samping itu terdapat pula sejumlah kendala yang potensial menghadang pelaksanaan MBS yaitu daya tahan para pelaksana, harapan-harapan yang tidak realistis, dukungan dewan madrasah yang tidak memadai, ketidak sejalan harapan guru dan kebijakan yang ada, hambatan-hambatan dalam pengambilan keputusan dan kegagalan para pihak untuk fokus pada tujuan utama MBM yaitu peningkatan kualitas pendidikan di madrasah yang bersangkutan.

Myers dan stonehill menyatakan penerapan MBM ini memberikan beberapa keuntungan yaitu :

- a. memungkinkan orang-orang yang berkompeten di madrasah untuk mengambil keputusan yang dapat memperbaiki pelajaran.
- b. memberikan kesempatan kepada seluruh komunitas madrasah dalam mengambil keputusan utama.
- c. memfokuskan pada tanggung jawab atas keputusan-keputusan yang diambil.
- d. mengarahkan kembali sumber-sumber daya guna mendukung pencapaian tujuan yang dikembangkan oleh masing-masing madrasah.

- e. menghasilkan rencana anggaran yang lebih realistis ketika orang tua dan guru makin menyadari keadaan keuangan madrasah, batasan pengeluaran, dan biaya program-program madrasah.²⁸

4. Prinsip-Prinsip Manajemen Berbasis Madrasah

Teori yang digunakan MBM untuk mengelola madrasah didasarkan pada empat prinsip yaitu:

- a. Prinsip Ekuifinalitas (*Principal of Equifinality*)

Prinsip ini didasarkan pada teori manajemen modern yang berasumsi bahwa terdapat beberapa cara yang berbeda-beda untuk mencapai suatu tujuan. MBM menekankan fleksibilitas sehingga madrasah harus dikelola oleh warga madrasah menurut kondisi mereka masing-masing. Karena kompleksnya pekerjaan madrasah saat ini dan adanya perbedaan yang besar antara madrasah yang satu dengan yang lain, misalnya perbedaan tingkat akademik siswa dan situasi komunitasnya, madrasah tak dapat dijalankan dengan struktur yang standar di seluruh kota, provinsi, apalagi negara. Madrasah harus mampu memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapinya dengan cara yang paling tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Walaupun madrasah yang berbeda memiliki masalah yang sama, cara penanganannya akan berlainan antara madrasah yang satu dengan yang lain.

- b. Prinsip Desentralisasi (*Principal of Decentralization*)

Desentralisasi adalah gejala yang penting dalam reformasi manajemen madrasah modern. Prinsip desentralisasi ini konsisten dengan prinsip ekuifinalitas. Prinsip desentralisasi dilandasi oleh teori dasar bahwa pengelolaan madrasah dan aktifitas pengajaran

²⁸ Sri Nurabdiah Pratiwi, "Manajemen Berbasis Sekolah", *Jurnal Edutech*, Vol. 2 No. 1 (2017).h. 90

tak dapat dielakkan dari kesulitan dan permasalahan. Pendidikan adalah masalah yang rumit dan kompleks sehingga memerlukan desentralisasi dalam pelaksanaannya.²⁹

Oleh karena itu, madrasah harus diberi kekuasaan dan tanggung jawab untuk memecahkan masalahnya secara efektif dan secepat mungkin ketika masalah itu muncul. Dengan kata lain, tujuan prinsip desentralisasi adalah efisiensi dalam pemecahan masalah, bukan menghindari masalah. Oleh karena itu MBS harus mampu menemukan masalah, memecahkannya tepat waktu dan memberi sumbangan yang lebih besar terhadap efektivitas aktivitas pengajaran dan pembelajaran. Tanpa adanya desentralisasi kewenangan kepada madrasah itu sendiri maka madrasah tidak dapat memecahkan masalahnya secara cepat, tepat, dan efisiensi.

c. Prinsip Sistem Pengelolaan Mandiri (*Principal of Self Managing System*)

Prinsip ini terkait dengan prinsip sebelumnya, yaitu prinsip ekuifinalitas dan prinsip desentralisasi. Ketika madrasah menghadapi permasalahan maka harus diselesaikan dengan caranya sendiri. Madrasah dapat menyelesaikan masalahnya bila telah terjadi pelimpahan wewenang dari birokrasi di atasnya ke tingkat madrasah. Dengan adanya kewenangan di tingkat madrasah itulah maka madrasah dapat melakukan sistem pengelolaan mandiri.

d. Prinsip Inisiatif Manusia (*Principal of Human Initiative*)

Prinsip ini mengakui bahwa manusia bukanlah sumber daya yang statis, melainkan dinamis. Oleh karena itu, potensi sumber daya manusia harus selalu digali, ditemukan, dan kemudian

²⁹ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).200-224

dikembangkan. Madrasah dan lembaga pendidikan yang lebih luas tidak dapat lagi menggunakan istilah *staffing* yang konotasinya hanya mengelola manusia sebagai barang yang statis.³⁰ Lembaga pendidikan harus menggunakan pendekatan *human resources development* yang memiliki konotasi dinamis dan menganggap serta memperlakukan manusia di madrasah sebagai aset yang amat penting dan memiliki potensi untuk terus dikembangkan.³¹

5. Komponen-Komponen Manajemen Berbasis Madrasah

Dalam menunjang keberhasilan dari manajemen pendidikan diperlukan beberapa sumber daya dan komponen-komponen manajemen pendidikan. Hal yang paling penting dalam Manajemen Madrasah (MBM) adalah manajemen terhadap komponen-komponen madrasah itu sendiri. Sedikitnya terdapat tujuh komponen madrasah yang harus dikelola dengan baik dalam rangka MBM yaitu :

a. Manajemen Kurikulum

Manajemen kurikulum dan program pengajaran mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional pada umumnya telah dilakukan oleh departemen pendidikan nasional pada tingkat pusat. Pengembangan kurikulum muatan lokal dimaksudkan terutama untuk mengimbangi kelemahan-kelemahan pengembangan kurikulum sentralisasi, dan bertujuan agar peserta didik mencintai dan mengenal lingkungannya, serta mau dan mampu melestarikan dan mengembangkan sumber daya alam, kualitas sosial, dan

³⁰ *Ibid* h.224-229

³¹E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004) h. 52.

kebudayaan yang mendukung pembangunan nasional, pembangunan regional, maupun pembangunan lokal sehingga peserta didik tidak terlepas dari akar sosial budaya lingkungannya.

Manager madrasah diharapkan dapat membimbing dan mengarahkan pengembangan kurikulum dan program pengajaran serta melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya. Dalam proses pengembangan program madrasah, manajer hendaknya tidak membatasi diri pada pendidikan dalam arti sempit, ia harus menghubungkan program-program madrasah dengan seluruh kehidupan peserta didik dan kebutuhan lingkungan. Untuk menjamin efektifitas pengembangan kurikulum dan program pengajaran dalam MBS, kepala madrasah sebagai pengelola program pengajaran bersama dengan guru-guru harus menjabarkan isi kurikulum secara lebih rinci dan operasional kedalam program tahunan, catur wulan dan bulanan. Adapun program mingguan atau program satuan pelajaran, wajib dikembangkan guru sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar. Berikut diperinci beberapa prinsip yang harus diperhatikan :

- 1) Tujuan yang dikendaki harus jelas, makin operasional tujuan, makin mudah terlihat dan makin tepat program-program yang dikembangkan untuk mencapai tujuan.
- 2) Program itu harus sederhana dan fleksibel.
- 3) Program-program yang disusun dan dikembangkan harus sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.³²

³² E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)h.212

4) Program yang dikembangkan harus menyeluruh dan harus jelas pencapaiannya.³³

5) Harus ada kordinasi antar komponen pelaksana program di madrasah.³⁴

b. Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan

Pendidik merupakan hal yang paling penting dalam sebuah lembaga pendidikan, karena dialah yang menjadi motor penggerak dan perubahan, bahkan bukan hanya sebagai agen perubahan tapi juga sebagai orang yang mendidik, mengarahkan, membimbing, dan mengevaluasi para peserta didiknya sehingga ia mampu mencapai tujuan yang diinginkan.

Manajemen tenaga kependidikan bertujuan untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal namun tetap dalam kondisi yang menyenangkan. Manajemen tenaga kependidikan mencakup :

1) Perencanaan pegawai

Perencanaan pegawai merupakan kegiatan untuk menentukan kebutuhan pegawai, baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk sekarang dan masa depan. Sebelum menyusun rencana, perlu dilakukan analisis pekerjaan dan analisis jabatan untuk memperoleh deskripsi pekerjaan. Informasi ini sangat membantu dalam menentukan jumlah pegawai yang

³³ Suparlan, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014)h.77

³⁴ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)h. 40-42.

diperlukan dan juga untuk menghasilkan spesifikasi pekerjaan.

2) Pengadaan pegawai

Pengadaan pegawai merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada suatu lembaga, baik jumlah maupun kualitasnya. Untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan, dilakukan kegiatan rekrutmen, yaitu usaha untuk mencari dan mendapatkan calon-calon pegawai yang memenuhi syarat sebanyak mungkin, untuk kemudian dipilih calon terbaik dan tercakup.

3) Pembinaan dan pengembangan pegawai

Fungsi pembinaan dan pengembangan pegawai merupakan fungsi pengelolaan personil yang mutlak perlu, untuk memperbaiki, menjaga, dan meningkatkan kinerja pegawai. Kegiatan Pembinaan dan pengembangan ini tidak hanya menyangkut aspek kemampuan, tetapi juga menyangkut karier pegawai.³⁵

4) Promosi dan mutasi

Di Indonesia, untuk pegawai negeri sipil, promosi atau pengangkatan pertama biasanya diangkat menjadi calon PNS dengan masa percobaan satu atau dua tahun, kemudian ia mengikuti latihan prajabatan, dan setelah lulus diangkat menjadi pegawai negeri sipil penuh, setelah pengangkatan pegawai kegiatan berikutnya adalah penempatan atau penugasan.

³⁵ *Ibid* h.177-180

5) Pemberhentian pegawai

Pemberhentian pegawai merupakan fungsi personalia yang menyebabkan terlepasnya pihak organisasi dan personil dari hak dan kewajiban sebagai lembaga tempat bekerja dan sebagai pegawai. Dalam kaitannya dengan tenaga kependidikan dimadrasah, khususnya pegawai negeri sipil, sebab-sebab pemberhentian pegawai ini dapat dikelompokkan kedalam tiga jenis yaitu, pemberhentian atas permohonan sendiri, pemberhentian oleh dinas atau pemerintah, pemberhentian sebab dan lain lain.

6) Kompensansi

Kompensansi adalah balas jasa yang diberikan organisasi kepada pegawai, yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai kecenderungan diberikan secara tetap. Pemberian kompensansi, selain dalam bentuk gaji, dapat juga berupa tunjangan, fasilitas perumahan, kendaraan dan lain-lain.³⁶

7) Penilaian pegawai

Penilaian tenaga kependidikan ini difokuskan pada prestasi individu dan peran sertanya dalam kegiatan madrasah. Bagi madrasah, hasil penilaian prestasi kerja tenaga kependidikan sangat penting dalam pengambilan keputusan berbagai hal, seperti identifikasi kebutuhan, program madrasah, penerimaan, pemilihan, pengenalan, penempatan, promosi, sistem imbalan, dan aspek lain dari

³⁶ *Ibid* h.180-185

keseluruhan proses efektif sumber daya manusia secara.³⁷

c. Manajemen keuangan dan pembiayaan

Manajemen keuangan pendidikan merupakan salah satu substansi pengelolaan madrasah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan dimadrasah. Sebagaimana yang terjadi di instansi pengelolaan pendidikan pada umumnya, kegiatan pengelolaan keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan pengawasan dan pengendalian.

Sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu madrasah secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga sumber yaitu, pemerintah baik pemerintah pusat daerah maupun kedua-duanya yang bersifat umum atau khusus dan diperuntukan bagi kepentingan kependidikan, orang tua atau peserta didik, masyarakat baik mengikat maupun mengikat.³⁸

Manajemen keuangan dan pembiayaan ini merupakan hal yang sensitive dibandingkan dengan manajemen bidang yang lainnya. Itulah sebabnya, maka manajemen bidang ini memerlukan keterbukaan dan akuntabilitas yang tinggi, khususnya tentang asal uang diperoleh dan penggunaannya. Berkenaan dengan manajemen keuangan dan pembiayaan ini, rencana anggaran penerimaan dan belanja madrasah (RAPBM) menjadi masalah terpelik yang biasa terjadi dimadrasah. Untuk mencegah masalah Mulyanto menegaskan bahwa sebelum RAPBM diputuskan, madrasah dilarang memungut biaya apapun oleh pihak madrasah atau komite

³⁷ *Ibid*, h. 42-43.

³⁸ *Ibid*, h. 48

madrasah. Penegasa ini pun didukung sepenuhnya oleh anggota DPRD Propinsi Jakarta.³⁹

d. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan untuk dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Adapun yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman, kebun, taman madrasah, jalan menuju madrasah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman madrasah untuk pengajaran biologi, halaman madrasah sebagai sekaligus lapangan olahraga, komponen tersebut merupakan sarana pendidikan.⁴⁰

Sarana prasarana merupakan fasilitas pendukung yang dapat menunjang proses kegiatan dalam organisasi apa saja termasuk di dalamnya adalah satuan pendidikan atau madrasah. Akan tetapi yang lebih penting adalah proses pengelolaan atau manajemen dari sarana prasarana itu sendiri, proses pengelolaan tersebut dapat berpengaruh terhadap sukses tidaknya suatu proses kegiatan.

e. Manajemen peran serta masyarakat

Madrasah sebagai lembaga sosial yang diselenggarakan dan dimiliki oleh masyarakat, harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Madrasah mempunyai kewajiban secara legal dan

³⁹.Suparlan, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) h.85.

⁴⁰ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).

moral untuk selalu memberikan penerangan kepada masyarakat tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan dan keadaanya, dan sebaliknya madrasah harus mengetahui dengan jelas apa kebutuhan, harapan, dan tuntutan masyarakatnya.

Dalam bidang peran serta masyarakat dan kemitraan madrasah pemerintah telah memberikan rambu-rambu standar pengelolaan sebagai berikut :

- 1) madrasah melibatkan warga dan masyarakat pendukung madrasah dalam mengelola pendidikan.
- 2) keterlibatan peran serta warga madrasah dalam pengelolaan, dibatasi pada kegiatan tertentu yang ditetapkan.
- 3) setiap madrasah menjalin kemitraan dengan lembaga lain yang relevan, berkaitan dengan *input*, *proses*, *output*, dan pememfaatan lulusan.
- 4) sistem kemitraan madrasah ditetapkan dengan perjanjian secara tertulis.⁴¹

Hubungan madrasah dengan masyarakat bertujuan antara lain untuk memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak, memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat, dan menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan madrasah. Kepala madrasah dituntut untuk senantiasa berusaha membina dan meningkatkan hubungan kerja sama yang baik antara madrasah dan masyarakat guna mewujudkan madrasah yang

⁴¹ Suparlan, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 90-99.

efektif dan efisien. Hubungan yang harmonis akan membentuk:

- 1) Saling pengertian antara madrasah , orang tua, masyarakat, dan lembaga-lembaga lain yang ada di masyarakat, termasuk dunia kerja.⁴²
- 2) Saling membantu antara madrasah dan masyarakat karena mengetahui manfaat, arti dan pentingnya peranan masing-masing.
- 3) Kerja sama yang erat antara madrasah dengan berbagai pihak yang ada dimasyarakat dan mereka merasa ikut bertanggung jawab atas suksesnya pendidikan di madrasah.⁴³

f. Manajemen kesiswaan

Manajemen kesiswaan adalah suatu penataan atau pengaturan segala aspek aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dari mulai masuknya peserta didik sampai keluarnya peserta didik dari satuan madrasah atau satuan lembaga pendidikan. Manajemen peserta didik bertujuan mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di madrasah lancar, tertib, dan teratur. Beberapa ahli berpendapat bahwa tujuan manajemen peserta didik adalah untuk menciptakan kondisi lingkungan madrasah yang baik serta agar siswa dapat belajar dengan tertib sehingga tercapai tujuan pengajaran yang efektif dan efisien.⁴⁴

g. Manajemen layanan khusus

⁴² Suparlan, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) h.100-102

⁴³ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004) h. 50-51.

⁴⁴ Ria Sita Ariska, "Manajemen Peserta Didik", *Jurnal*, Vol. 9 No. 6 (2015).h. 828.

Manajemen layanan khusus di madrasah ditetapkan dan diorganisasikan untuk memudahkan atau memperlancar pembelajaran, serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di madrasah. Diantaranya meliputi: manajemen layanan bimbingan konseling, layanan perpustakaan madrasah, layanan kesehatan, layanan asrama, dan manajemen layanan kantin madrasah. Layanan-layanan tersebut harus dikelola dengan baik dan benarsehingga dapat memperlancar pencapaian tujuan pendidikan di madrasah.⁴⁵

C. Karakteristik Manajemen Berbasis Madrasah

Karakteristik MBM bisa diketahui antara lain dari bagaimana madrasah dapat mengoptimalkan kinerjanya, proses pembelajaran, pengelolaan sumber belajar professionalism tenaga kependidikan, serta system administrasi secara keseluruhan. Menurut Saud berdasarkan pelaksanaan dinegara maju mengemukakan bahwa karakteristik dasar MBM adalah pemberian otonomi yang luas kepada madrasah, partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi, kepemimpinan madrasah yang demokratis dan professional, serta adanya teamwork yang tinggi dan professional.⁴⁶

Menurut Levacic, seperti yng dikutip oleh Ibrahim Bafandhal, menjelaskan bahwa dalam Manajemen Berbasis Madrasah, ada tiga karakteristik yang menjadi ciri khas dan harus dikedepankan dari yang lain pada manajemen tersebut, yaitu sebagai berikut :

⁴⁵ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004 h. 39.

⁴⁶ *Ibid*, h. 29.

1. kekuasaan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan yang didesentralisasikan kepada para stakeholder madrasah.
2. domain Manajemen peningkatan mutu pendidikan yang mencakup keseluruhan aspek peningkatan mutu pendidikan, mencakup kurikulum, kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, penerimaan, dan siswa baru.
3. walaupun keseluruhan domain manajemen peningkatan mutu pendidikan didesentralisasikan kepada madrasah-madrasah, diperlukan regulasi yang mengatur fungsi kontrol pusat terhadap keseluruhan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab pemerintah.⁴⁷

Manajemen Berbasis Madrasah memiliki karakteristik yang harus dipahami oleh madrasah yang menerapkan. Karakteristik Manajemen Berbasis didasarkan atas input, proses, dan output. Selanjutnya, uraian berikut dimulai dari output dan diakhiri input, mengingat output memiliki tingkat kepentingan tertinggi, sedang proses memiliki tingkat kepentingan satu tingkat lebih rendah dari output, dan input memiliki tingkat kepentingan satu tingkat lebih rendah dari output, dan input memiliki tingkat kepentingan dua tingkat lebih rendah dari output.

D. Penelitian yang Relevan

Penelitian relevan adalah untuk menjelaskan posisi, perbedaan atau memperkuat hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang telah ada. Pengkajian terhadap hasil penelitian orang lain yang relevan, lebih berfungsi sebagai pembanding dari kesimpulan berpikir peneliti. Untuk

⁴⁷ E. Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional.*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010). h. 124.

menghindari duplikasi, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu.

Penelitian yang secara tidak langsung berkaitan dengan tema pembahasan ini yaitu :

1. Tesis Rahmadi Tanjung tahun 2018 yang berjudul “peranan komite madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan di madrasah ibtdaiyah negeri lopian kecamatan badiri kabupaten tapanuli tengah. Dari hasil penelitian tesis tersebut bisa diambil kesimpulan bahwasannya peranan komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah ibtdaiyah negeri lopian yaitu
 - a. Sebagai pemberi pertimbangan dalam setiap rencana dan program yang disusun oleh MIN Lopian.
 - b. Sebagai pendukung penyelenggara dan peningkatan mutu pendidikan di MIN Lopian seperti memberi kritik saran dan membantu kemandirian madrasah dalam hal anggaran.
 - c. Sebagai badan pengontrol terhadap pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di MIN Lopian.
 - d. Sebagai mediator atau penghubung antara aspirasi orang tua dan masyarakat terhadap pihak MIN Lopian.

2. Ramli jurnal peradaban islam yang berjudul “peran komite madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan madrasah Dari hasil penelitian dan pembahahasan jurnal tersebut bisa diambil kesimpulan bahwasannya perencanaan yang dilakukan oleh komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah di kabupaten Aceh Besar yaitu

membentuk struktur komite madrasah dan rapat rutin komite madrasah dengan pihak madrasah dan masyarakat tiap tiga bulan sekali atau akhir semester, merencanakan dan melaksanakan program perayaan hari-hari besar agama dan nasional bersama-sama dengan madrasah lainnya.

3. Indonesian Journal of education management and administration review (IJEMAR) yang berjudul “fungsi dan peran komite madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan : studi di SMK Negeri 2 dan SMK Negeri Tasikmalaya. Dari hasil penelitian dan pembahasan jurnal tersebut bisa diambil kesimpulan bahwasannya usaha komite dalam menggalang dana masyarakat di kedua madrasah cukup baik terkait dengan kemampuan komite madrasah dalam mengusahakan menggalang dana dari masyarakat serta menjalin komunikasi dan kerjasama dengan orang tua siswa dan tokoh masyarakat guna mengembangkan mutu pendidikan madrasah.

Berdasarkan penelitian yang relevan di atas ada perbedaan yang mendasar dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu: Penelitian terdahulu membahas tentang bagaimana kegiatan yang dilakukan komite madrasah sehingga mempunyai pengaruh terhadap pelayanan pendidikan yang kemudian data di olah menggunakan rumus korelasi, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah hendak mengetahui bagaimana peran komite madrasah dalam peningkatan dalam pelaksanaan mana (MBM) , dimana jenis penelitian yang penulis lakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif, dan teknik analisis datanya dengan menggunakan model milles dan Huberman yaitu data *rediction*, data *display* dan data *conclutions*.

DAFTAR PUSTAKA

- 004/U/2002, Kepmendiknas SK No. *Tentang Acuan Pembentukan Komite Sekolah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Anshori, Hasan. “Pentingnya Manajemen Berbasis Madrasah Dalam Kepemimpinan Madrasah Efektik”. *Tarbawi*. Vol. 2 no. 1 (2016), p. 27.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Ariska, Ria Sita. “Manajemen Peserta Didik”. *Jurnal*. Vol. 9 no. 6 (2015).
- Barnawi, and Arifin. *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. *Petunjuk Teknis Pemberdayaan Komite Sekolah Tahun 2007 – 2009*. Jakarta, 2007.
- Direktorat Pendidikan Agama Islam, Pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah*. Jakarta: Dirjen PAIS KEMENAG RI, 2012.
- E. Mulyasa. *Manajemen Berbasis Sekolah*,. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Ghazali, Imam. *Al Mumayyaz Alquran Tajwid Warna Transliterasi Per Kata*. Bekasi: Cipta bagus segara, n.d.
- Grafika, Tim Redaksi Sinar. *Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Cet. 4*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Hasbullah. *Otonomi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Moleong, and Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Mulyasa, E. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian Guru Dan Kepala Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

- . *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mulyono. *Manajemen Administrasi Dan Organisasi Pendidikan*, (. Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2008.
- Penyusun, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Pratiwi, Sri Nurabdiah. "Manajemen Berbasis Sekolah". *Jurnal Edutech*. Vol. 2 no. 1 (2017).
- RI., Departemen Agama. *Pedoman Komite Sekolah (Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam)*., 2003.
- Sri Rerani Pantjastuti. *Komite Sekolah*. (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008.
- Sudjana, Nana, and Ibrahim. *Penelitian Dan Penilaian Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian "Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D."* (Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suparlan. *Manajemen Berbasis Madrasah*,. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- . *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Syukur, Fatah. *Manajemen Pendidikan Berbasis Pada Madrasah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011.
- Tilaar, H.R.R. *Kekuasaan Dan Pendidikan : Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka cipta, n.d.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, n.d.
- Uno, Hamzah B. *Profesi Kependidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Wirawan. *Evaluasi Teori, Model, Standar, Model, Aplikasi Dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.